

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Akan tetapi selain mempunyai kewenangan, pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber dayanya tersebut. Oleh karena itu sistem akuntansi menjadi tuntutan sekaligus kebutuhan bagi setiap pemerintah daerah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal.

Sistem akuntansi merupakan sebuah sistem yang memproses data dan transaksi untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Sistem akuntansi merupakan supersistem yang terdiri dari sistem akuntansi pertanggungjawaban dan sistem sistem pemrosesan transaksi. Sistem akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan dan dapat dijadikan pedoman dalam penyajian informasi yang diperlukan oleh berbagai pihak dengan berbagai kepentingan (*general purposes financial statement*). Sistem akuntansi memberikan landasan tentang prosedur, teknik, dan metode yang layak akan merekam segala peristiwa penting.

Menurut Kepmendagri No.29 Tahun 2002 pasal (70) ayat (1), bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, pengelolaan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian uang serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum dan yang dilakukan dengan cara manual maupun dengan cara aplikasi.

Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK no. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat, maka sistem akuntansi pemerintah pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan Pemendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perubahan atas permendagri No. 13 tahun 2006 yaitu pada pasal 232 yang mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu syarat dan pedoman bagi pemerintah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Hasil pemeriksaan BPK (Badan Pengawas Keuangan) terhadap Kabupaten Ponorogo selama 5 tahun terakhir yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Walaupun begitu, BPK masih menemukan adanya kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut antara lain terdapat pembayaran jasa konsultasi perencanaan yang melebihi standar biaya yang ditetapkan Kepala Daerah serta kekurangan volume dan kualitas atas pelaksanaan pekerjaan

Belanja Modal, pengelolaan aset tetap masih kurang memadai, pelaksanaan hibah baik uang maupun barang kurang memadai, aplikasi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan belum sepenuhnya bisa diandalkan. (BPK Perwakilan Jawa Timur 2019).

Menurut Agustina dkk (2019) penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan dapat terus ditingkatkan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. peningkatan yang berkaitan dengan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah ini sangat penting dilaksanakan untuk mendukung kinerja pemerintah dalam rangka menghasilkan laporan keuangan. selain itu, diharapkan tidak akan ada kemunculan salah saji seiring dengan diadakannya peningkatan-peningkatan terkait sistem akuntansi keuangan daerah.

Untuk bisa menjalankan sistem akuntansi keuangan daerah dengan baik harus didukung oleh organisasi yang memiliki perilaku yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan penyajian laporan keuangan secara akrual dan berkualitas agar pemanfaatan dari laporan keuangan ini benar-benar akan lebih transparan. Khaulia dkk (2019) menyatakan bahwa perilaku organisasi merupakan bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi, yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi.

Faktor berperilaku organisasi dalam hal ini mengacu pada tiga faktor antara lain kejelasan tujuan didefinisikan sebagai kejelasan dari sasaran dan tujuan digunakannya sistem akuntansi keuangan daerah di semua level organisasi yang lebih maju dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang ada. Pelatihan merupakan suatu usaha pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem yang berlaku dan membantu untuk bisa mengoperasikan sistem akuntansi keuangan daerah yang ada pada organisasi. Dukungan atasan diartikan sebagai keterlibatan manajer dalam kemajuan organisasi dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan yang akan di butuhkan oleh pegawai. Dalam pelaksanaan otonomi daerah di perlukan sistem akuntansi yang transparan. Oleh karena itu pemanfaatan sistem ini sangat membantu untuk bisa mempermudah dalam pengelolaan keuangan dan mempercepat akses pencatatan, pembukuan dalam organisasi pemerintahan. Hal ini tidak lepas dari perilaku organisasi mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan menetapkan serta melakukan kebijakan dan pertanggungjawaban .

Terdapat beberapa hasil penelitian sebelumnya diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Suwigyo (2019) bahwa pelatihan dan kejelasan tujuan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dan implikasinya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Penelitian oleh Khaulia dkk (2019) menyatakan bahwa dukungan atasan berpengaruh positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Agustina dkk (2019) menyatakan bahwa

sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kegunaan sistem informasi akuntansi keuangan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintah dibidang keuangan untuk disusun menjadi sebuah skripsi dengan judul “PENGARUH FAKTOR KEPERILAKUAN ORGANISASI TERHADAP KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH “. (Studi Empiris pada Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Ponorogo)

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah Kejelasan Tujuan berpengaruh terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ?
2. Apakah Pelatihan berpengaruh terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ?
3. Apakah Dukungan Atasan berpengaruh terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ?
4. Apakah Kejelasan Tujuan, Pelatihan, dan Dukungan Atasan berpengaruh terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pengaruh Kejelasan Tujuan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah
2. Mengetahui pengaruh Pelatihan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah
3. Mengetahui pengaruh Dukungan atasan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah
4. Mengetahui pengaruh Kejelasan Tujuan, Pelatihan, dan Dukungan Atasan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dan diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Hasil penelitian diharapkan menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan serta dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh faktor keperilakuan organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
2. Bagi Obyek yang diteliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan mengenai Sistem Keuangan Daerah yang saat itu ditetapkan.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan pengetahuan tentang kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dan dapat digunakan bahan masukan dalam penelitian selanjutnya.

4. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai wahana pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian dengan mengaplikasikan teori yang sudah didapat selama studi di perguruan tinggi.

